

TAJUK RENCANA

Mengaktifkan Posko Covid-19 RT/RW

SEIRING melandainya kasus Covid-19 di DIY, sejumlah posko Covid-19 di tingkat RT dan RW tak lagi aktif, kecuali untuk wilayah yang memang potensi penularannya cukup tinggi. Namun, kini ketika kasus mulai naik, meski tidak signifikan, serta menjelang diterapkannya PPKM Level 3 untuk seluruh wilayah terkait libur Natal dan tahun baru, Posko Covid-19 di tingkat RT dan RW mulai diaktifkan kembali, walau belum semuanya.

Tentu kita tak ingin lagi kecolongan, karena berdasar pengalaman, usai libur panjang terjadi lonjakan kasus, termasuk di DIY. Bila kita cermati, kondisi DIY saat ini sudah nampak seperti normal kembali. Mobilitas masyarakat meningkat, wisatawan berdatangan dan hotel-hotel dipenuhi pengunjung. Hampir bisa dipastikan tingkat okupansi hotel meningkat dibanding sebelumnya.

Fenomena ini memang patut disyukuri, karena ekonomi mulai bergerak karena sentra-sentra ekonomi juga dinamis menuju normal. Tapi di balik itu, kita juga menyempatkan kekhawatiran karena sentra-sentra masyarakat mulai abai terhadap protokol kesehatan (prokes). Meski berulang kali telah diingatkan untuk taat prokes, ada saja yang membandel. Untuk itulah kita mendorong aparat penegak hukum lebih tegas lagi dalam memperingatkan masyarakat yang tidak patuh prokes. Sanksi bagi pelanggar prokes juga harus diterapkan secara konsisten tanpa tebang pilih.

Kita sangat paham pemerintah pusat melarang mudik pada even Natal dan tahun baru. Tapi pemerintah mestinya juga tahu bahwa banyak yang menyiasati larangan

tersebut, yakni dengan mudik sebelum Natal dan tahun baru. Inilah yang mestinya diantisipasi, antara lain dengan menerapkan skrining yang ketat di titik-titik keberangkatan, seperti terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan bandara.

Penggunaan aplikasi PeduliLindungi adalah salah satu bentuk ikhtiar yang bisa dilakukan untuk mendeteksi seseorang apakah sudah divaksin atau belum, juga mendeteksi jejak perjalanan seseorang apakah pernah masuk zona merah, dan sebagainya. Itu hanyalah bentuk ikhtiar untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Tapi di samping itu, harus ada upaya secara terus menerus dan masif untuk mengingatkan masyarakat agar taat prokes, meski mereka sudah lolos dari pintu penjagaan. Sebab, berdasar pengalaman, mereka taat prokes ketika masuk pintu penjagaan area publik, namun setelah itu acap abai, misalnya tidak mengenakan masker, tidak cuci tangan dan masih berkerumun.

Artinya, pengawasan tidak selesai ketika orang sudah lolos dari penjagaan di pintu masuk, melainkan juga ketika yang bersangkutan berada di area publik. Kita sangat paham bahwa petugas pengawas jumlahnya sangat terbatas, namun mereka tetap dituntut bekerja optimal. Apalagi, menjelang diberlakukannya PPKM Level 3.

Kalau mau jujur, melihat kondisi di DIY saat ini, di mana mobilitas masyarakatnya sangat tinggi, bahkan jalanan mulai macet, banyak kerumunan, restoran dan hotel penuh, kiranya sudah patut diterapkan pembatasan-pembatasan yang lebih ketat lagi mendekati PPKM Level 3. □

Agroforestry Menyejahterakan Petani

DI TENGAH pandemic yang menghampiri hamper seluruh aspek kehidupan, sektor pertanian dapat dibidang menjadi sektor yang terbilang stabil. Karena menopang kehidupan orang banyak, selalu dilakukan upaya mengolah lahan agar tetap dapat bertahan hidup untuk menghidupi dirinya maupun orang lain. Seperti dilakukan petani Desa Wonotulus Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Mereka bekerja keras, mengusahakan lahan hutannya untuk tanaman kayu seperti pohon jati, mahoni, dan sengon.

Memang semua belum dioptimalkan pemanfaatannya. Dengan Bahasa Jawa *eman-eman* terdapat gagasan untuk mengombinasikan antara tanaman kayu dengan tanaman pangan (ketela atau jagung) dan tanaman empon-empon (jahe, kencur, temu lawak, laos, kunyit putih). Hal tersebut dimaksud agar petani tetap dapat memperoleh hasil selain dari tanaman pokok yakni tanaman kayu. Mengingat masa panen tanaman kayu sangat lama, 5 tahunan. Sementara, tanaman jagung dan tanaman ketela merupakan sebagai pangan alternatif. Sedang tanaman empon-empon memiliki khasiat herbal yang dikenal dengan istilah *relay cropping*.

Pola Tanam
Relay cropping merupakan bagian dari pola tanam. Seperti yang dibahas ppid (2019), pola tanam merupakan usaha penanaman pada sebidang lahan yang mengatur susunan tata letak dan urutan tanaman selama periode waktu tertentu pada masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami selama periode tertentu.

Ada tiga jenis pola tanam yakni monokultur, polikultur dan rotasi tanam. Pola tanam monokultur adalah pertanian dengan menanam tanaman sejenis misal padi saja, jagung saja atau kedelai saja. Sedangkan polikultur merupakan pola pertanian dengan menanam be-

Arta Kusumaningrum

berapa jenis tanaman pada satu bidang lahan yang tersusun dan terencana serta menerapkan aspek lingkungan yang lebih baik misal jagung dengan kedelai atau ketela dengan jagung. Dan rotasi tanam adalah pola tanam yang dikembangkan dengan cara mengganti tanaman budidaya setiap musim. *Relay cropping* merupakan pola tanam polikultur



mak belukar. Dengan metode *relay cropping* pengolahan tanah tetap terjaga sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanah.

Tanaman Sisipan

Untuk tanaman sisipan kita pilih yang memiliki masa panen kurang setahun seperti ketela dan jagung. Tanaman ketela dengan masa panen ± 9 bulan sedangkan jagung dengan masa panen ± 3 bulan dan tanaman empon-empon memiliki masa panen ± 10 - 12 bulan. Hal ini dimaksud agar masa tunggu panen utama yakni tanaman kayu, tetap ada hasil. Karena petani dapat meningkatkan hasil dari tanaman jagung atau ketela serta tanaman empon-empon yang memiliki masa panen relatif cepat. Oleh karena itu kita mengoptimalkan adanya lahan hutan.

Dari hasil jagung atau ketela dapat dihidangkan sebagai gizi keluarga yang kaya akan karbohidrat. Begitu juga dengan empon-empon dapat kita manfaatkan sebagai jamu-jamuan herbal dan sebagian dapat kita jual untuk penghasilan tambahan keluarga. Dengan metode *relay cropping* petani dapat *survive* termasuk dalam menghadapi pandemi covid-19. □

* Arta Kusumaningrum SP

MSc, Dosen Agribisnis Universitas Muhammadiyah Purworejo
Alumni Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pasca Sarjana, UGM

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak beres ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Guru Paripurna

HARI Guru, 25 November 2021, usai diperingati. Guru adalah pahlawan dan teladan bangsa. Tanpa kehadiran guru, generasi saat ini akan menjadi generasi minus ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai modal utama menyongsong masa depan yang mencerahkan.

Kita semua memiliki nostalgia masing-masing terhadap kiprah konstruktif guru yang telah mengajari, membimbing, dan membentuk diri kita hingga bisa berpikir jernih, rasional, dan kritis, sehingga mampu memecahkan setiap persoalan.

Menjadi guru sangatlah berat. Apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19. Semakin teruji jiwa dan raga mereka dalam memberikan pengajaran kepada peserta didiknya. Di sini terpancar jiwa kasih sayang dari guru untuk peserta didiknya.

Guru tidak boleh bersikap kasar kepada peserta didiknya. Ini akan berdampak buruk terhadap psikis peserta didik dalam menjalani masa sekolahnya. Guru harus sabar dan ikhlas menerima segenap risiko dan tantangan yang ada di depan mata.

Belajar online selama masa pandemi Covid-19 adalah sebuah tantangan besar bagi seluruh guru. Mereka harus kreatif dan inovatif mengatur strategi agar peserta didiknya tidak malas untuk belajar, sehingga ke depan dapat tumbuh sebagai manusia Indonesia yang cerdas berkeadaban.

Dunia guru akan terus diwarnai oleh

tantangan berat, lebih berat dari masa sekarang. Orang-orang yang kini mendarabkakan menjadi guru harus bersiap lebih dini agar kuat menghadapi tantangan tersebut.

Tantangan besar guru masa kini adalah merekonstruksi akhlak mulia agar terpatri di dalam jiwa peserta didik. Akhlak mulia telah mengalami kemerosotan signifikan. Hal itu terbukti dengan ditemukannya peserta didik yang melakukan tindakan bullying, klithih, tawuran, miras, dan sebagainya.

Perbuatan tersebut sangat berbahaya jika diabaikan begitu saja. Peran guru sangat dinantikan. Guru memiliki kemampuan membaca pola pikir dan tingkah laku peserta didiknya. Pada saat yang sama, guru juga bisa memberikan secercah solusi sarat makna yang dapat diberikan kepada peserta didiknya. Saat ini harapan guru pasti mendambakan agar peserta didik bisa memancarkan suluh akhlak mulia hingga ke penjuru buana.

Jika hal itu telah terlaksana, maka bisa dikatakan telah tampil sebagai guru paripurna. Guru yang berhasil membangun akhlak mulia sebagai fondasi dari kekuatan hidup sepanjang masa. Karena itu terushlah berjuang membangun akhlak mulia bagi peserta didik, sehingga mereka bisa lahir menjadi generasi cerdas berkeadaban dan berkemajuan. □

***) Cristoffer Veron Purnomo,**
Anggota Grup Jaringan Anak Panah.

Pajak, Belenggu Industri?

PEREKONOMIAN Indonesia yang mengalami kontraksi selama pandemi Covid-19 mendorong pemerintah untuk menyusun rangkaian kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya melalui RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sah menjadi Undang-Undang setelah diketok palu pada Rapat Paripurna DPR RI (7/10/2021). Salah satu isinya mengenai kenaikan tarif PPN yang saat ini sebesar 10% secara bertahap meningkat menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, rencana pemerintah ini mengikuti tren global di mana banyak negara tengah menaikkan tarif PPN. Pemerintah menilai kebijakan kenaikan tarif PPN tersebut telah memperhatikan asas keadilan karena pemerintah tidak akan mengenakan PPN terhadap sembako bagi kebutuhan masyarakat luas. PPN untuk sembako hanya berlaku bagi bahan pokok yang memiliki kriteria atau kelas premium.

Memberatkan

Tanpa adanya kenaikan pun, PPN sudah memberatkan pelaku usaha apalagi untuk kelas Industri Kecil Menengah (IKM). Pelaku usaha yang telah ditetapkan sebagai PKP diwajibkan untuk memungut PPN, namun disisi lain mereka akan bersaing dengan pelaku usaha non-PKP. Konsumen akan beralih ke pelaku usaha non-PKP karena tidak akan dipungut PPN sehingga harga akan lebih rendah. Pelaku usaha non-PKP tetap memiliki kewajiban perpajakan melalui skema PPh Final.

Kebijakan kenaikan tarif PPN akan semakin memberatkan pelaku usaha yang tengah berjuang bertahan dalam pandemi Covid-19. Kenaikan tarif PPN juga akan berdampak pada harga bahan baku pada supplier dan biaya produksi.

Paryanto Utomo

Adanya kebijakan kenaikan PPN pada umumnya akan membatasi konsumsi masyarakat karena kenaikan harga.

Dampak lanjutan dari kenaikan tarif PPN ini bisa memberikan ketidakpastian yang tinggi. Adanya kenaikan tarif PPN menjadi 11% ini diperkirakan bisa mendorong terjadinya inflasi yang lebih tinggi dan menyebabkan penurunan pendapatan riil yang dapat dibelanjakan. Selanjutnya, dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan PDB dan meningkatnya pengangguran. Kenaikan PPN juga memicu adanya ketimpangan karena efek regresif pada keluarga berpenghasilan rendah.

Waktu Tepat

Secara umum, memang banyak negara yang berhasil menaikkan tarif PPN tanpa mengorbankan ekonomi dan mampu menaikkan penerimaan pajak. Tetapi waktu yang tepat adalah kunci utamanya. Selain itu, meningkatkan pendapatan negara tidak mutlak melalui kenaikan tarif pajak tetapi bisa melalui beberapa strategi. Seperti inovasi penggalangan potensi untuk peningkatan tax ratio, memperluas objek pajak, peningkatan pelayanan dan fasilitas perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta strategi lainnya. Pemerintah perlu berfokus untuk bagaimana menggerakkan perekonomian. Mendorong ekonomi dengan cara memberi insentif dan salah satunya turunkan PPN bukan kenaikan PPN.

Beberapa penelitian seperti yang dilakukan International Monetary Fund tahun 2010 melalui publikasi World Economic

Outlook, Chapter 3: Will It Hurt? Macroeconomic Effects of Fiscal Consolidation, mengemukakan bahwa bahwa pengurangan pengeluaran jauh lebih efektif daripada kenaikan pajak dalam menstabilkan utang dan menghindari kemerosotan ekonomi. Mengurangi pengeluaran pemerintah akan jauh lebih menguntungkan efek ekonomi karena tidak akan memiliki efek distorsi pada konsumsi dan pasokan tenaga kerj. Bahkan justru akan menciptakan lebih banyak pekerjaan, PDB lebih tinggi, standar hidup yang lebih baik dan lebih sedikit efek depresiasi pada beberapa bidang baik jangka pendek maupun panjang. Kenaikan tarif PPN akan lebih diterima jika terdapat faktor-faktor lain yang disiapkan pemerintah untuk melindungi efek kenaikan pada pelaku usaha dan pembayar pajak. □

***) Paryanto S Utomo MAP, Kadiv**
Advokasi dan Kebijakan Asosiasi Pengusaha Aluminium Yogyakarta (Aspayo)

Pojok KR

Hentikan PTM, rugi 2-3 kali, perlu kajian komprehensif.
-- Tidak digeneralisasi, tapi kesehatan tetap utama. ***

Kasus Covid-19 Menurun, WHO tetapkan Indonesia Negara Hijau.
-- Bukan berarti prokes boleh kendur. ***

Posko Covid-19 RT diaktifkan, pantau warga dari luar daerah.
-- Tak perlu tunggu PPKM level 3.

Berabs

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mubassahad. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandkr@yahoo.com, iklandkr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluar...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogyakarta - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rekening: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Kepala Biro: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.